

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA, PEMBENTUKAN

2021

UU NO.10, LN 2021/NO. 297, 8 HLM. TLN NO. 6754, 6 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM, DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

- ABSTRAK : - Dengan luasnya wilayah pelayanan hukum dan dengan pembentukan provinsi baru dan guna meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan perlu membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21, pasal 24A ayat (5) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009.
  - Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Mengatur daerah hukum dari masing-masing PTUN dimaksud dan kedudukannya PTUN-PTUN Provinsi yang bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dari masing-masing PTUN dimaksud di atas. Mengatur pelimpahan perkara setelah beroperasinya masing-masing PTUN dimaksud di atas.

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021;
  2. Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana PTUN dimaksud di atas paling lambat 4 tahun sejak UU ini diundangkan;
  3. Penjelasan 6 halaman.